# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Transportasi merupakan alat bagi manusia untuk melakukan perpindahan dari tempat asal menuju tempat tujuan. Transportasi bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, dan teratur. Perkembangan transportasi terus berkembang seiring berjalannya waktu sehingga transportasi menjadi tumbuh di berbagai bidang. Mulai dari ekonomi dan pembangunan.

Pentingnya angkutan umum untuk kegiatan perpindahan masyarakat maka dalam penyelenggaraannya perlu ada bimbingan dan pembinaan dari pemerintah setempat. Pemerintah harus berperan aktif untuk pengoperasionalan angkutan umum yang tertib, teratur dan berhasil guna baik dari penumpang maupun operator.

Kurangnya minat masyarakat Kabupaten Jombang untuk menggunakan angkutan umum sebagai alat transportasi untuk melakukan perpindahan dikarenakan pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan standar pelayanan minimum. Keterbatasan pelayanan angkutan umum pada Kabupaten Jombang serta panjangnya jarak menuju pusat kota menyebabkan masyarakat berusaha untuk memfasilitasi pergerakanya sendiri dengan kendaraan pribadi.

Kabupaten Jombang memiliki 8 (delapan) trayek angkutan pedesaan yaitu trayek B,B1,G,G2,H,H2,K dan O. Tumpang tindih tertinggi mencapai 88% pada trayek K. Karena semakin tinggi tumpang tindih maka kinerja pelayanan angkutan tersebut semakin buruk. Sesuai dengan standar pelayanan minimum LLAJ SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687 Tahun 2002 bahwasanya tumpang tindih tidak lebih dari 50%.

Dari permasalahan angkutan umum yang ada di Kabupaten Jombang perlu adanya pembenahan dari pemerintah untuk mengembangkan angkutan umum di Kabupaten Jombang. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di Kabupaten Jombang pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhinya dengan cara menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan mencakup semua wilayah Kabupaten Jombang. Untuk mewujudkan permasalahan tersebut pemerintah dapat menetapkan kebijakan Buy The Service atau pembelian layanan pada angkutan umum di Kabupaten Jombang.

Buy The Service adalah sistem dimana perjalanan bus melayani trayek – trayek yang dibeli oleh pemerintah untuk kemudian pemerintah menjual layanan tersebut kepada masyarakat dengan tarif yang sudah di tetapkan (Sutomo, 2002). Pada sistem ini pemerintah bekerjasama dengan operator dimana operator adalah pihak swasta, dengan memindahkan resiko surplus atau defisit operasi dari tangan operator ke pemerintah.

Dengan penggunaan skema Buy The Service ini, pengoperasian angkutan umum tidak menggunakan sistem setoran, dan hanya mengedepankan pelayanan masyarakat. Sistemnya adalah operator sebagai pengatur untuk sopir dan juga angkutan yang beroperasi untuk memenuhi standar operasional pelayanan yang sudah ditetapkan dalam pengoeprasioan angkutan pada Skema Buy The Service. Namun disisi lain untuk menerapkan skema Buy The Service ini pemerintah harus mengeluarkan dana untuk subsidi yang tidak sedikit maka dari itu perencanaan program ini harus memberikan hasil yang baik untuk masyarakat. Untuk terealisasikannya penerapan skema Buy The Service ini penghitungan biaya yang akan dikeluarkan harus akurat sehingga pengeluaran anggaran untuk merealisasikan skema ini tidak ada halangan.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perencanaan Penerapan Skema *Buy The Service* Pada Angkutan Pedesaan di Kabupaten Jombang”**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian di Kabupaten Jombang terkait angkutan umum terdapat permasalahan sebagai berikut:

* + 1. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi.
		2. Frekuensi angkutan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan umum yaitu kurang dari 12 kendaraan per jam.
		3. Pelayanan angkutan umum belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum.
		4. Pada Tahun 2022 Hanya Terdapat 8 Trayek Yang Masih Beroperasi.

## . Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

* + 1. Bagaimana kondisi kinerja angkutan pedesaan yang melayani Kabupaten Jombang saat ini?
		2. Bagaimana kondisi Demand Actual dan Demand Potential pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Jombang?
		3. Bagaimana kinerja operasi angkutan pedesaan dengan menggunakan skema Buy The Service di Kabupaten Jombang?
		4. Bagaimana biaya perhitungan biaya operasional kendaraan dan tarif dengan menggunakan skema Buy The Service?
		5. Bagaimana perhitungan subsidi untuk penerapan skema Buy The Service?

## . Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki pelayanan angkutan pedesaan di kabupaten Jombang dengan menerapkan skema Buy The Service pada angkutan pedesaan di Kabupaten Jombang. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

* + 1. Mengetahui kondisi kinerja angkutan pedesaaan yang melayani Kabupaten Jombang saat ini.
		2. Mengetahui permintaan penumpang pada angkutan pedesaan di Kabupaten Jombang.
		3. Menganalisis kinerja operasi angkutan pedesaan dengan menggunakan skema Buy The Service di Kabupaten Jombang.
		4. Menyampaikan hasil perhitungan biaya operasional kendaraan dengan skema Buy The Service pada angkutan pedesaan di Kabupaten Jombang.

## . Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, agar dapat lebih fokus, maka ruang lingkupnya dibatasi dimana lokasi penelitiannya adalah di Kabupaten Jombang. Adapun Batasan masalah pembahasan dari penelitian yang akan difokuskan hanya pada hal – hal sebagai berikut :

* + 1. Batasan Wilayah Kajian

Lokasi studi yang dikaji merupakan angkutan pedesaan dengan rute Jombang-Ploso-Kabuh-Ngusikan.

* + 1. Batasan Analisis dan Pembahasan
			1. Mengevaluasi kinerja pada angkutan pedesaan di Kabupaten Jombang.
			2. Penentuan jumlah permintaan angkutan umum demand actual dan demand potensial.
			3. Melakukan perhitungan kinerja operasi angkutan pedesaan pada trayek di Kabupaten Jombang dengan menggunakan skema *Buy The Service*.
			4. Melakukan perhitungan biaya operasional kendaraan dan tarif dengan skema *Buy The Service*.
			5. Perhitungan subsidi untuk penerapan skema *Buy The Service*.